

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan proses *Collaborative Governance*. Adanya beberapa proses kolaborasi yang belum berjalan seperti upaya membangun kepercayaan, serta membangun komitmen karena klaim pengelolaan objek wisata Danau Sipin yang terbagi menjadi dua membuat proses kolaborasi tersebut sulit dilakukan untuk membangun kepercayaan antar pihak terlibat serta komitmen kolaborasi yang juga belum dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Sedangkan untuk proses kolaborasi lainnya yaitu dialog tatap muka, proses saling memahami serta Hasil sementara sudah mulai berjalan dengan menghasilkan tujuan kolaborasi yaitu kesepakatan pengelolaan objek wisata Danau Sipin yang akan diberikan pada BUMD Siginjai Sakti sebagai pengelola. Sayangnya rencana ini masih dalam tahap dikondisikan untuk pelaksanaannya.
- b. Faktor Penghambat Hubungan *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin yaitu ada tiga. Pertama, Faktor Struktur Sosial dimana tidak adanya perjanjian pembagian kerja sama dalam kolaborasi atau MOU untuk kesepakatan kerja sama sehingga masih Pemerintah mendominasi hubungan kolaborasi. Kedua, Faktor Budaya yaitu

adanya budaya kerja yang bersifat *Top Down* membuat keputusan bersama hanya dilakukan oleh Pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Kota Jambi bersama Pemimpin dalam rencana pengelolaan objek wisata Danau Sipin yang akan diberikan oleh BUMD Siginjau Sakti sehingga keterlibatan swasta masih terbatas. Ketiga, Faktor Kepentingan Pemerintah yaitu adanya tumpang tindih kewenangan dalam dua pengelolaan oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi dan Dinas Pariwisata Provinsi Jambi.

#### **4.2 Saran**

- a. Dibutuhkan kebijakan yang dapat mengatur ruang kolaborasi menjadi lebih maksimal, terutama bagi pihak swasta dan masyarakat dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah. Terkait kolaborasi dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin, dibutuhkan peran swasta dan masyarakat yang lebih maksimal. Peran swasta dan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan seperti yang telah direncanakan dalam Forum OPD untuk BUMD Siginjau Sakti dengan sistem diberlakukannya tiket masuk atau parkir, pembuatan acara menarik, kerja sama biro travel dan kegiatan lainnya di Danau Sipin Kota Jambi. Pengelolaan wisata yang profesional dapat berjalan melalui koordinasi dari berbagai pihak dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, serta daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

b. Pertama, dibuatnya MoU baru dan perjanjian kerjasama antar pihak terlibat, sehingga masing-masing pihak memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Kedua, Pembentukan wadah atau forum komunikasi yang rutin dilakukan baik oleh Pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ketiga, Pengelolaan wisata dilakukan menjadi satu agar terawat dan mendapat hasil.

